

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com
Senin
26 Februari 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Pj Wali Kota Baubau Minta Peserta Seleksi JPT Jangan Kepedean



Peserta seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama tingkat Kota Baubau

Pewarta: Ardi

BAUBAU, BP-Tahapan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT) tingkat Kota Baubau tahun 2024 kini sudah memasuki tahapan penulisan dan penilaian makalah serta wawancara akhir yang dilaksanakan di hotel Galaxi Inn Sabtu (24/2/2024) dan dihadiri langsung oleh Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si.

Sekda Buton Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jama-luddin, SPd, MSi me-

wakili Pj. Bupati Buton melantik dan mengambil Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemkab Buton DI Aula Kantor

Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, 22 Februari 2024.

Turut hadir dalam pelantikan para Asisten,

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkab Buton Tengah Audensi dengan UGM Bahas Inisiasi Kerja Sama



Pewarta: Andina L

Dalam arahnya Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si mengungkapkan, semua hasil yang diperoleh nanti itu adalah hasil kerja peserta seleksi JPT. Arti-

Lanjutkan ke Hal: 7

BUTENG, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati kerjasama di bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat dalam bidang Tridarma.

Kerjasama ini di tandangani oleh Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf dan Rektor UGM, Ova Emilia, di ruang Rektor UGM, Jumat (23/2/2024).

Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf menu-

Lanjutkan ke Hal: 7

Asrun Lio Bersama Ketua DWP Sultra Hadiri Peringatan Hari Peringatan Sampah Nasional



Laporan: Ardi

KENDARI, BP-, Pj. Gubernur Sultra diwakili Sekretaris Daerah Prov.

Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M. Hum., Ph.D, menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun

2024 yang mengusung tema "Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif", yang dis-

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Pj Wali Kota Baubau Minta Peserta Seleksi JPT Jangan Kepedean

nya bahwa, dalam setiap seleksi, agar mempersiapkan diri untuk bisa memberikan yang terbaik dan jangan mengandalkan terlalu kepedean.

Ditambahkan, pengisian jabatan melalui panitia seleksi itu merupakan proses. Sehingga kalau berbicara proses berarti belum akhir dari suatu perjalanan. Karena itu, jika mengikuti seleksi

kemudian tidak lolos seleksi bukan berarti juga akhir dari sebuah perjalanan melainkan hal yang terbagi bukan di proses seleksi JPT ini.

Menurut orang nomor satu di Kota Baubau ini, semua panitia seleksi memiliki kompetensi.

Oleh sebab itu, kalau misalnya panitia seleksi menanyakan sesuatu bisa jadi jawaban yang diharapkan dari seseorang itu

bisa berbeda. "Jadi sekali lagi, pertanyaan yang ada itu tidak semua jawabannya sama dengan itu, kalau dilevel wawancara. Biasanya kita ingin menggali". Agar kita siap untuk menjelaskan, kita harus banyak membaca dan berdiskusi.

Sehingga inti dari poin ketiga ini adalah apa yang disampaikan/diputuskan oleh panel ini adalah keputusan yang ter-

baik. Dan kita sudah memberikan amanah dan kepercayaan kepada panitia seleksi, ujarnya.

Dr Muh Rasman Manafi mengajak kepada semua peserta seleksi JPT yang sama-sama sedang berjuang untuk memahami apa yang sudah telah disampaikan. Pihaknya juga akan berupaya untuk bisa masuk dan berinteraksi di beberapa sesi nantinya. (*)

Pemkab Buton Tengah Audensi dengan UGM Bahas Inisiasi Kerja Sama

turkan, wilayah Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah kepulauan. Sebagian besar wilayahnya di kelilingi laut dan memiliki potensi strategis di bidang perikanan dan kelautan.

"Saya berharap kedatangannya bersama rombongan secara spesifik, persoalan-persoalan yang ada di Buton Tengah dapat di atur dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) secara detail dan rinci. Tidak hanya aspek perikanan, kalautan, pariwisata, namun juga pertambangan",harapnya.

Untuk itu kata Pj Bupati, kami sangat butuh kajian-kajian yang akan memberikan manfaat ekonomi, dan berharap dengan MoU ini peluang bisa terbuka untuk masyarakat Buton Tengah menempuh studi S1, S2, S3 di UGM.

Sementara itu Rektor UGM mengatakan terima kasih atas kepercayaan yang terjalin sejak tahun 2018. Ia berharap, kerja sama yang terjalin selama ini berjalan baik dan memberi manfaat.

"Kami sangat mengapresiasi

jalanan kerja sama ini. UGM sangat fokus karena sebagai universitas juga memerlukan ruang atau ladang bermain yang dikaitkan dengan hal-hal praktis. Situlah kita mengembangkan ilmu-ilmu," ungkapnya.

Untuk potensi di bidang perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan, menurut Rektor UGM, perlu di rinci kembali ke dalam detail PKS berikutnya. UGM sangat berharap kerja sama yang terjalin bisa menyeluruh dari hulu ke hilir. Sehingga untuk budidaya lobster misalnya, tidak hanya membudidayakan lobster atau udang secara efisien, namun juga hingga pemasaran, dengan menjaga kualitas bahwa lobster atau udang merupakan kualitas ekspor.

Terkait peningkatan SDM, Rektor UGM mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk menyediakan beasiswa untuk siswa-siswa yang akan sekolah di perguruan tinggi, termasuk UGM.

"Kita berharap semoga yang telah di inisiasi bersama nantinya dapat mengembangkan daerah Kabupaten Buton Tengah",pungkasnya. (*)

Sekda Buton Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Staf Ahli serta para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

Berikut Dua Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton:

1. H. Abdul Rais, SP, jabatan lama Kepala Bagian Administrasi Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, jabatan baru Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah

Kabupaten Buton. 2. Drs. La Naji, jabatan lama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buton, jabatan baru Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd, M.Si dalam sambutannya menyampaikan pelantikan tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan dan merupaka hasil lelang sebelumnya dan telah mendapat persetujuan

juan KASN untuk dilantik.

"Selamat kepada pejabat tinggi yang baru saja dilantik semoga dapat memberikan spirit baru dan semangat baru untuk membangun Buton menjadi lebih baik lagi," kata Sekda.

Jenderal ASN itu juga menegaskan agar para Kepala OPD termasuk yang baru saja dilantik untuk terus bekerja, utamanya data. "Data termasuk permintaan

data baik secara lisan maupun tertulis harus diperhatikan dengan baik," katanya.

Sekdamenitip pesan pada kedua pejabat yang baru dilantik untuk bekerja sesuai tupoksi dengan efektif. "Jalankan tugas dengan sepenuh hati semangat dan etos kerja yang baik agar bisa memberikan kontribusi dan pelayanan baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat," pungkaskan Sekda. (*)

Asrun Lio Bersama Ketua DWP Sultra Hadiri Peringatan Hari Peringatan Sampah Nasional

elenggarakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov.Sultra bekerjasama dengan PKK dan DWP Prov. Sultra di Lapangan ex-MTQ Kota Kendari, (Jumat, 23 Februari 2024)

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DWP Prov. Sultra sekaligus Ketua PKK Prov. Sultra, Staf Ahli Gubernur Sultra, Kadis Pertanian dan Peternakan, Kadis Kehutanan, Kadispora, Kadis Koperasi, Kadis Perpustakaan, Kepala Biro BLP, Kepala Biro Pembangunan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Pemerintahan, Plt. Kadis LHK, Anggota DWP Sultra, Anggota PKK Sultra, serta para perwakilan Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sultra

Laporan Ketua Panitia oleh Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Awaluddin, menyampaikan bahwa ada 4 tujuan kegiatan HPSN yaitu:

Pertama, memperkuat komitmen dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, tingkat nasional dan daerah dalam mengatasi polusi plastik

Kedua, memperkuat partisipasi dan kesadaran publik dalam upaya pengelolaan sampah, dari sumber untuk mengurangi sampah yang diolah di tempat pemrosesan akhir melalui gerakan memilah dan mengolah sampah

Ketiga, memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya, dalam implementasi circular economy atau bisnis hijau (Green Business), dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi

Keempat, membangun rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor

Dalam kegiatan HPSN tahun ini, meliputi sedekah sam-

pah dan kerja bakti dengan melibatkan seluruh ASN Lingkup Prov. Sultra, serta Ibu-Ibu PKK Prov. Sultra, Anggota Dharma Wanita Persatuan Prov. Sultra

Sambutan, Pj. Gubernur Sultra yang diwakili Sekda Sultra, mengatakan dengan adanya kegiatan ini merupakan tindaklanjuti nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 2 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, tentang peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024

Hari ini kita kumpulkan sampah ini merupakan cara produktif yang memberikan sedekah kepada pemulung, kita membantu kerja-kerja pemulung supaya kita tau, bagaimana mengumpulkan sampah dan itu sebagai bentuk kepedulian kita dan

Pj. Gubernur mengapresiasi DLH Prov. Sultra yang telah melakukan inovasi, kreatifitas dalam rangka menggugah masyarakat agar bagaimana peduli terhadap lingkungan kita masing-masing dengan cara melakukan sedekah kepada sampah-sampah kita kepada pemulung. Ucapan Sekda Sultra

Tahun 2023 yang lalu menjadi sejarah dalam fenomena global, khususnya pada perubahan iklim. Berdasarkan pengamatan BMKG tahun 2023, Indonesia mengalami temperatur terpanas sepanjang sejarah dengan suhu rata-rata sebesar 27,2 °C yang merupakan anomali suhu udara rata-rata tahun 2023, lebih tinggi 0,5 °C dibandingkan suhu rata-rata periode 1991-2020

Tingginya suhu ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan kondisi alam el-nino, salah satu penyumbang peristiwa terse-



but diakibatkan oleh timbulnya sampah plastik yang fantastis.

Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk mengarus utamakan isu penyelesaian polusi plastik. Didalam majelis lingkungan hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan satu resolusi untuk mengakhiri sampah dan polusi plastik, dengan membentuk perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang ditargetkan dapat disepakati pada akhir tahun 2024 ini

Pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam pembahasan draft resolusi tersebut dalam forum Intergovernmental Negotiated Committee (INC). Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Pentingnya menentukan langkah prioritas dalam mencapai produksi dan konsumsi plastik yang berkelan-

butan, 2. Pentingnya formulasi standar dan perbaikannya dalam produksi dengan mengadopsi Full Life Cycle of Plastic dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan 3. Pentingnya kerangka kebijakan untuk mendorong skema Reusability dan Recyclability dari plastik

Sehingga untuk recycle yaitu mudah mendaur ulang terdapat 5 warna tong sampah yaitu:

1. Warna Hijau : Sampah Organik (daun, sisa makanan, ranting)

2. Warna Kuning : Sampah Guna Ulang (plastik, kaca, kaleng) lampu, aki, obat nyamuk)

2. Warna Merah : Sampah B3/Bahan Berbahaya & Beracun (baterai,

4. Warna Biru : Sampah Daur Ulang (kertas, kardus, koran)

5. Warna Abu-

Abu : Sampah Residu (puntung rokok, popok, tisu, kapas)

Sebelum mengakhiri sambutannya ini, menghimbau kepada kita semua untuk saling bekerjasama dengan semangat yang tinggi serta jiwa kemandirian dalam menjaga lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam, khususnya menjaga lingkungan kita dari sampah plastik. Dan atas nama Pemerintah Prov. Sultra, saya sampaikan terimakasih kepada seluruh ASN, Pengurus Tim Penggerak PKK dan seluruh anggota DWP Lingkup Pemprov. Sultra

Sekda Sultra didampingi Ketua Tim. PKK Prov. Sultra sekaligus DWP Sultra akan menyerahkan sedekah sampah secara simbolis kepada pemulung. Tutupnya. (*)

Politikus Senior PPP Tolak Hak Angket, PDIP Buka Suara



Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu.

Laporan: Hasim

JAKARTA-Ketua Majelis Kehormatan PPP, Zarkasih Nur menolak wacana hak angket di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 yang diusulkan capres mereka, Ganjar Pranowo.

Zarkasih meminta Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono untuk mempertimbangkan dengan cermat usulan hak angket oleh Ganjar. Menurut dia, hak angket hanya berpotensi menimbulkan perpecahan.

"Kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih lewat keterangan tertulis, Jumat (23/2).

Dia mengimbau jajaran DPP PPP, terutama di DPR untuk kembali ke khittah atau tujuan awal, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan dan meletakkan persatuan, serta keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya.

Dia sekaligus mengingatkan agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukkan sikap ksatria. Begitupula pihak yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat.

"Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah Swt," kata Zarkasih.

Merespons hal itu, Adian menyebut hak angket untuk menyelidiki dugaan

kecurangan pemilu merupakan hak konstitusional yang dimiliki DPR. Adian juga tetap optimistis fraksi PPP di DPR mendukung usulan tersebut.

"Kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian orang sedang menghitung perolehan suaranya di pileg," kata dia di Jakarta.

Dia menyebut kecurangan pemilu telah dilakukan dengan sangat vulgar, dan karena itu sulit untuk mendiampikannya. Anggota Komisi VII DPR itu tak ingin hal serupa terus berulang ke depan.

"Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita memilih untuk berdiam diri gitu? Enggak ada," kata Adian. (*)

TKN: Kabinet Prabowo-Gibran Akan Imbang antara Partai dan Profesional

Laporan: Hasim

JAKARTA-- Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan diisi sama banyak antara perwakilan partai dan profesional.

Dasco tidak menampik bahwa Prabowo-Gibran diusung oleh koalisi yang gemuk. Namun ia mengatakan dari pembicaraan sejauh ini, kabinet akan diisi proporsional.

"Partai politik memang cukup gemuk tetapi kalau dari hasil pembicaraan itu akan imbang antara profesional dan partai. Akan imbang, kira-kira gitu, ya mungkin 55-45 misalnya," kata

Dasco dalam podcast Political Show CNN Indonesia, Rabu (21/2).

Ia mengatakan salah satu parameter untuk menentukan komposisi menteri bagi partai politik adalah jumlah perolehan suara.

Ada juga parameter terkait kerja pemenangan Prabowo-Gibran di lapangan.

"Bagaimana waktu di lapangan dalam kemenangan, yang mana yang kerjanya all out. Kita kan ada indikatornya, kita lihat kita alami, kita saksi dan ini akan jadi poin penting," ujar Dasco,

"Jangan kemudian misalnya di awal oh begini, tapi kemudian kerja di lapangannya enggak, ya mohon maaf," imbu dia.

Dasco enggan men-

jawab ketika ditanya apakah ada partai di Koalisi Indonesia Maju yang kurang optimal dalam memenangkan Prabowo-Gibran.

Dasco: Prabowo Minta 5 Kali ke Jokowi untuk Jadikan Gibran Cawapres Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang diisi oleh Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Prima, Gelora, dan Garuda.

Sejauh ini, berdasar hasil quick count sejumlah lembaga survei, Prabowo-Gibran menang dari Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Pasangan ini juga unggul berdasar hitungan sementara real count KPU. (*)

Paloh Ungkap Isi Pertemuan Dengan Jokowi: Bahas Perkembangan Situasi



Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku membicarakan situasi terkini setelah pemungutan suara Pemilu 2024 saat bertemu Presiden Joko Widodo

Laporan: Hadi

JAKARTA-Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku membicarakan situasi terkini setelah pemungutan suara Pemilu 2024 saat bertemu Presiden Joko Widodo Keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

"Membicarakan bagaimana keadaan, perkembangan, situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita," ucapnya di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2).

Dia mengklaim hanya itu yang dibicarakan. Tak lebih. Paloh mengatakan pertemuan juga dilakukan seraya menyantap makan malam bersama.

"Tidak lebih dari pada itu barangkali

ya," ujarnya.

Surya Paloh menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Minggu lalu (18/2). Jokowi mengaku pertemuannya dengan Paloh bermanfaat bagi perpolitikan di Indonesia.

Namun ia tak merinci manfaat apa yang dihasilkan dari pertemuannya dengan partai pengusung AMIN itu. Jokowi juga meminta publik tak usah menerka-

nerka pihak yang mengundang.

"Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Yang paling penting itu," kata Jokowi usai meresmikan RSPPN Panglima Besar Soedirman di Jl. Veteran Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Petinggi Partai

NasDem Willy Aditya menyampaikan bahwa Surya Paloh selalu berpesan agar persatuan bangsa harus dijaga.

Willy menyampaikan itu usai Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan usai pemungutan suara Pilpres 2024.

"Bagaimana Pak Surya seringkali menyampaikan jangan karena Pemilu lalu kemudian negara bangsa kita porak poranda atau terpecah belah," kata Willy kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Minggu malam (19/2). (*)

AHY untuk Pertama Kali Dampingi Jokowi Kunker Resmikan Bendungan

Laporan: Listar

JAKARTA- Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat (23/2).

AHY untuk pertama kali mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja (kunker) setelah resmi dilantik menjadi menteri dua hari lalu.

Selain AHY, Jokowi juga didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Bendungan Lolak



Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Bendungan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara

merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

Sebelum ke Sulawesi Utara, Jokowi lebih dahulu berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk meresmikan Makassar New Port, SPAL-DT Losari

serta 27 ruas jalan daerah.

Jokowi juga sempat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros.

Jokowi dalam kesempatan itu menyebut kenaikan harga beras terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bedanya, lanjut Jokowi, hanya Indonesia yang memberikan bantuan pangan kepada masyarakatnya. (*)

Pj Gubernur ABR: Pemprov Sultra Akan Gunakan Manajemen Talenta Dalam Pengisian Jabatan



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menerima audiensi Tim dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sultra, Kamis (22/02/24).

Turut hadir dalam audiensi tersebut yakni Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio, Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimti Wilayah II KASN Prof. Agustinus Fatem, Kepala BKD Pemprov Sultra, serta Asisten Komisioner Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimti Wilayah II KASN Adi Pramono Sidik.

Prof Agustinus Fatem dalam kesempatannya mengatakan bahwa Pemprov Sultra perlu menata kembali sistem merit dalam pengisian jabatan menyangkut promosi dan rotasi. Persoalan masa lalu harus segera diselesaikan dan kedepan dalam pelaksanaan promosi dan mutasi agar disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia menambahkan, ada 3 (tiga) komponen utama yang harus diupayakan dalam keadaan terbaik oleh setiap Pegawai sebagai pertimbangan untuk promosi ke dalam Jabatan Pimti.

"Pertama, kompetensi mereka harus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan. Kedua, para ASN dalam pelaksanaan tugasnya harus tunjukkan kinerja terbaik. Ketiga, menjaga perilaku kerja seperti disiplin,

integritas, dan loyalitas," ujarnya. Sementara itu, Pj Gubernur menyampaikan akan menyelesaikan berbagai persoalan sebagaimana rekomendasi KASN dalam pengisian jabatan Pimti di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

"Insya Allah, kita akan tindak lanjut rekomendasi dari KASN yang belum terlaksana melalui mekanisme uji kompetensi. Aturannya kan sudah jelas, kita terapkan manajemen talenta sebagaimana amanat Undang-Undang No 20 tahun 2023 tentang ASN.

Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri bersama rombongan di Bumi Anoa. Kunjungan ini sebagai bentuk pembinaan terhadap penyusunan produk hukum di daerah," ucapnya.

Jenderal ASN Sultra ini mengatakan, kunjungan ini sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan Pemprov Sultra saat ini, khususnya dalam penyusunan produk hukum. Beberapa rancangan tersebut. Pertama rancangan Peraturan Daerah tentang penyerahan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Kedua, lanjutnya, terkait rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Sultra tahun anggaran 2024, dan ketiga rancangan

Hal ini semata untuk mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan kinerja ASN," ungkapnya.

Sebelumnya, KASN juga mengapresiasi kinerja sistem merit ASN Pemprov Sultra yang mengalami peningkatan di bawah kepemimpinan Andap Budhi Revianto.

"Alhamdulillah, kemarin Ketua KASN Prof Agus Pramusinto juga mengapresiasi kinerja sistem merit ASN kita. Pemprov Sultra berhasil naik dari kategori kurang menjadi baik. Kedepan kita harus mampu meraih kategori sangat baik karena ini akan mengecualikan kita dalam pengisian jabatan karena tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka," tutup Andap.*

Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023, Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.

Sekda Sultra ini menerangkan, terkait rancangan peraturan daerah tentang penyerahan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka dapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, maka Bank Umum wajib memenuhi modal inti minimum.

"Sehubungan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sultra sebagai pemegang saham mayoritas,

Pimti Pemprov Sultra Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas TA 2024



Pewarta: Nandar

KENDARI, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas oleh 58 Pimti, masing-masing Sekda Provinsi, Sahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (23/02/24).

Kegiatan diselenggarakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang setiap tahun dilakukan setelah penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintahan Daerah maka perlu disusun sebuah Perjanjian Kinerja (PK).

Disamping itu, PK tersebut menjadi langkah awal strategis implementasi program dan kegiatan Pemprov Sultra dan merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan

kinerja Aparatur.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto dalam arahannya mengatakan bahwa PK merupakan turunan dari Renstra dan Renja yang memuat mengenai sasaran, indikator, target, dan anggaran. PK juga merupakan kesepakatan dan komitmen antara Pimpinan tertinggi dengan Pimpinan Unit Kerja di bawahnya guna mencapai target kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang ada.

Ia juga menyampaikan bahwa langkah berikutnya adalah menyusun rencana aksi sebagai akselerasi implementasi PK sekaligus sebagai tools untuk memonitoring, mengevaluasi, dan sekaligus mensupervisi perkembangan dan kemajuan kinerja organisasi.

Selanjutnya Pj Gubernur mengatakan, momentum penandatanganan ini sebagai wujud komitmen dalam upaya penguatan akuntabilitas kerja dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Andap juga

menekankan bahwa selama ia bertugas selaku Pj Gubernur Sultra, dirinya ingin meletakkan dasar sekaligus meninggalkan legacy hal baik bagi Pemerintah Provinsi Sultra.

"Saya tekankan kepada Rekan-Rekan di Pemprov Sultra, mari kita meletakkan dasar yang baik sebagai legacy bagi penerus kita," ungkapnya.

Pj Gubernur mengajak seluruh lini organisasi, "Milikilah tanggung jawab yang besar serta sense of belonging terhadap organisasi, bekerja sesuai dengan aturan yang didasari oleh ketentuan perundang-undangan, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja ini," tegasnya.

Menutup arahnya, Andap mengajak seluruh entitas Pemprov Sultra untuk terus memberikan kinerja terbaiknya, do your best, terus kembangkan diri untuk menorehkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif.*

Pemprov Sultra Konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI

Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan disegala bidang, termasuk diantaranya bagaimana menghasilkan regulasi yang dapat berkontribusi positif bagi kemajuan daerah, dengan melakukan konsultasi pada Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hasil konsultasi tersebut, rupanya langsung mendapatkan respon dari Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI, melalui kunjungan secara langsung ke Pemprov Sultra, yang kemudian

digelar melalui rapat koordinasi bersama, termasuk menghadirkan PT BPD Sultra, kemarin, di Kendari.

Mewakili Pj Gubernur, Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M. Hum.,Ph.D menerima secara langsung kunjungan Plh Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI bersama rombongan, kemudian langsung menggelar rapat koordinasi bersama, yang diantaranya turut hadir Kepala BP-KAD Provinsi Sultra, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sultra, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sultra, dan Direktur Utama BPD Sultra.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, saya menyampaikan selamat datang kepada Plh Direktur Produk

Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri bersama rombongan di Bumi Anoa. Kunjungan ini sebagai bentuk pembinaan terhadap penyusunan produk hukum di daerah," ucapnya.

Jenderal ASN Sultra ini mengatakan, kunjungan ini sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan Pemprov Sultra saat ini, khususnya dalam penyusunan produk hukum. Beberapa rancangan tersebut. Pertama rancangan Peraturan Daerah tentang penyerahan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Kedua, lanjutnya, terkait rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Sultra tahun anggaran 2024, dan ketiga rancangan

Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023, Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.

Sekda Sultra ini menerangkan, terkait rancangan peraturan daerah tentang penyerahan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, maka dapat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, maka Bank Umum wajib memenuhi modal inti minimum.

"Sehubungan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sultra sebagai pemegang saham mayoritas,

tas, mempunyai kewajiban untuk melakukan penyerahan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Untuk melaksanakan kewajiban memenuhi intin minimum," ujarnya.

Sekda Sultra menuturkan, berdasarkan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka Penyerahan modal pemerintah daerah pada per-

seroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

"Kami menyadari betul akan pentingnya peran dan fungsi Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, utamanya dalam memberikan pedoman, petunjuk teknis, arahan, asistensi dan kerjasama guna menata standar pembentukan peraturan yang ideal, khususnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah," ucapnya.

Dia melanjutkan, rapat koordinasi itu juga sebagai komitmen pemerintah daerah pada per-

rah, bahwa terkait berbagai investasi, dipastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan daerah.

"Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sultra, sekali lagi menyampaikan terimakasih kepada Plh Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri dan rombongan, yang telah menyempatkan untuk datang di Bumi Anoa, dalam rangka asistensi produk hukum daerah provinsi Sultra," tutupnya.*

Ketua Dekranasda Buton Kunjungi IKM Wabula



Pewartar: Rahman

BUTON, BP-Ketua Dekranasda Kabupaten Buton, Ny Dra Andi Asniwati Mustari melaksanakan kunjungan di Sentra Industri Kecil menengah (IKM) Tenunan Wabula, di Kecamatan Wabula, Senin, 12 Februari 2024.

Ketua Dekranasda bersama rombongan melihat secara langsung kegiatan ibu-ibu PKK dan masyarakat terhadap tenunan khas Wabula yang ikonik yang merupakan aset tenunan khas Buton.

Ketua Dekranasda Buton mengharapkan pengembangan

pengrajin tenunan kiranya kegiatan ini dimaksimalkan dalam arti baik pola atau model ditingkatkan karna kebutuhan konsumen harus terpenuhi. Kemudian pasokan kain tenun harus disiapkan jangan sampai konsumen memesan bahan habis.

“Dan dalam hal peningkatan produk tenun itu kiranya diperlukan kerja sama antara pemerintah lewat Instansi terkait (Dekranas) dan pengusaha tenunan, itu dimaksudkan baik modal ataupun pemasaran akan sinergis memudahkan peningkatan industri tenun tersebut,”

katanya.

Pihak Dekranasda juga akan terus mengawal, mengawasi, membimbing di setiap kegiatan industri di Kabupaten Buton agar lebih maju dan mampu bersaing dengan daerah lain.

Ketua Dekranasda yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Buton mengharapkan para pengrajin untuk terus berkarya menciptakan sesuatu yg bermanfaat sehingga berguna bagi kita juga orang lain.

“Dalam mencapai kesuksesan tentunya dimulai dari yang kecil lalu berjuang hingga mencapai kemajuan,” pungkas Ketua Dekranasda. (*)

DWP Buton Gelar Family Gathering



Pewartar: Rahman

BUTON, BP-Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton menggelar Family Gathering di Pantai Nirwana Kota Baubau, Sabtu, 10 Februari 2024.

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi bersama Pembina DWP Kabupaten Buton, yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Buton, Ny. Dra. Andi Asniwati, Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi dan Ketua DWP Kabupat-

en Buton, Ny. Kiki Amalia Asnawi, Kepala OPD dan Ketua DWP OPD bersama anggota turut hadir pada giat tersebut.

“Kegiatan seperti ini sangat berguna untuk semakin mempererat tali silaturahmi antar sesama khususnya DWP Kabupaten Buton,” kata Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi di sela-sela lomba.

Orang nomor satu di Kabupaten Bu-

ton ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DWP yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

“Kegiatan seperti ini, harus dilaksanakan setiap bulan dengan tempat yang berbeda. Manfaatkan dan jadikan sebuah momentum tersebut untuk mempererat silaturahmi antar sesama khususnya DWP dan ASN Kabupaten Buton,” katanya. (*)

Sekda Buton Dilantik Jadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka Kendari



Pewartar: Rahman

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si. dilantik sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Terbuka (UT) Kendari periode 2024-2029 di Hotel Clario Kendari, pada Minggu siang, 18 Februari 2024.

Prosesi pelantikan tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal IKA UT Indonesia KRT. Drs. H. Leles Sudarmanto Dipuro, M.M., M.B.A.

Prosesi pelantikan kepengurusan IKA UT Kendari dirangkaikan dengan Seminar Akademik UT Kendari yang merupakan bagian tradisi akademik setiap pelaksanaan wisuda UT.

Dalam sambutannya Sekda Buton menyampaikan Ikatan Alumni merupakan salah satu wadah bersama bagi alumnus untuk berhimpun guna menyalurkan aspirasi.

“IKA UT juga bertujuan membantu sosialisasi program-program UT ke masyarakat, meningkatkan silaturahmi, bagian dalam pengembangan serta pemberdayaan alumni UT dan yang tidak kalah penting adalah sebagai wahana peningkatan profesi anggota melalui konsep jejaring,” jelasnya.

Jenderal ASN di Buton ini menyampaikan dalam mengemban amanah sebagai Ketua IKA, Ia akan bekerja bersama pengurus, dengan program awal yaitu membentuk pengurus wilayah dan

mendorong untuk terbentuknya pengurus cabang di kabupaten/kota agar lebih dikenal oleh masyarakat banyak.

“Jumlah alumni UT Kendari yang tersebar di 17 kabupaten/kota yang mencapai ribuan, merupakan suatu kekuatan bagi organisasi bila dimanfaatkan secara baik. Sebagai bagian dari UT Kendari, akan sangat bermanfaat bila dapat menjadi media dan saluran untuk marketing UT guna pencapaian target peningkatan angka partisipasi mahasiswa, program bea-

siswa dan juga bagian dari pengabdian alumni kepada masyarakat terkait mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Sekda juga mengatakan IKA UT Kendari akan berusaha bekerja dengan sebaik mungkin dan memohon dukungan semua pihak agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat UT.

“Semoga kepengurusan ini, menjadi pengurus IKA UT Kendari yang handal dan dapat memberikan manfaat signifikan kepada semua anggota dan UT Kendari. Terimakasih atas kepercayaan yang diamanatkan, semoga kita sukses dalam segala urusan,” tutupnya. (*)

TNI AU Haluoleo Undang Dinas Terkait Hadiri Jambore Drone Sultra

Pewartar: Rahman

KENDARI, BP-Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) Haluoleo mengadakan Jambore Drone Sultra di Pangkalan TNI AU Haluoleo, pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Peserta Jambore tersebut berasal dari berbagai pihak mulai dari instansi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, tiga mata TNI, Kepolisian, Basarnas, BPN, Perusahaan, Komunitas, hingga pelajar.

Komandan Lanud Haluoleo Kolonel. Pnb. Lilik Eko Susanto, S.E., M.M. menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan Jambore Drone Sultra untuk mengemban potensi

dirgantara di Sulawesi Tenggara.

“Tujuannya sebenarnya untuk menggali potensi kedirgantaraan di Sulawesi Tenggara, khususnya drone. Dimana sekarang drone ini banyak digunakan di instansi-instansi pemerintah, kemudian juga di perusahaan-perusahaan yang berada di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.

Lanjutnya Ia mengatakan bahwa dengan berkumpulnya berbagai pihak dapat menjadi sarana silaturahmi, bertukar ilmu, pengalaman, dan saling memberikan saran terkait drone.

“Kami ajak berkumpul supaya kita

bisa bersama-sama untuk mencari solusi apabila ada permasalahan penggunaan drone, kemudian ada teknologi-teknologi baru atau apa. Kita sering diskusi untuk bisa saling tukar-menukar ilmu dan pengalaman, sehingga pada pelaksanaan di lapangan kita bisa stabilis langsung jalan, tidak ada kendala-kendala yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya Danlanud mengungkapkan bahwa sebagai Federasi Aero Sport Infonesia (Fasida) yang menaungi kegiatan aerosol sport di Sulawesi Tenggara, Ia merasa bertanggung jawab untuk mewadahi kegiatan

tersebut.

“Kita memang sedang bertumbuh, harapannya dengan adanya Jambore ini adalah titik awal tumbuhnya seluruh peserta dan komunitas drone yang ada di Sulawesi Tenggara,” harapnya.

Hadir sebagai pemateri Jambore Drone Sultra yaitu Ketua Umum Federasi Drone Indonesia (FDI), Airnav Indonesia perwakilan Sultra, dan Pilot Drone Profesional.

Materi yang dibawakan mulai potensi dirgantara dalam penggunaan drone hingga regulasi perizinan terbang drone. (*)

Kemenkes Bertekad Mempercepat Eliminasi Kanker Serviks

Laporan: Warman

JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendukung akselerasi eliminasi kanker leher rahim atau lebih dikenal dengan nama kanker serviks melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) yang diluncurkan tahun lalu. RAN Eliminasi Kanker Leher Rahim berisi empat pilar, di antaranya pilar layanan yang meliputi skrining, imunisasi vaksin Human papillomavirus (HPV), dan tata laksana bagi pasien pra-kanker.

Penyakit kanker telah menjadi penyebab kematian tertinggi baik secara nasional maupun global. WHO Regional Asia Tenggara menyebutkan Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi di kawasan untuk incidence rate atau angka kasus baru dan peringkat keempat untuk mortality rate.

The International Agency for Research on Cancer (IARC) mengestimasi terdapat 408.661 kasus baru dan sebanyak 242.988 kematian di Indonesia pada 2022. Selain itu, IARC memprediksikan terjadi peningkatan 77% kasus kanker pada 2050.

Kanker leher rahim atau yang lebih dikenal dengan kanker serviks merupakan kondisi ketika pertumbuhan sel-sel ganas pada leher rahim/serviks yang tidak terkendali. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi persisten Human Papiloma Virus (HPV) onkogenik.

Berdasarkan kaitannya dengan kanker leher rahim dan lesi pra-kanker, HPV dikelompokkan menjadi tipe risiko tinggi atau high-risk and risiko rendah atau low-risk. Lebih dari 75% kasus kanker leher rahim disebabkan oleh HPV risiko tinggi tipe 16 dan 18.

Ketua tim kerja pe-

nyakit kanker dan kelainan darah PTM Kementerian Kesehatan dr. Sandra menjelaskan, WHO meluncurkan Strategi Global untuk Eliminasi Kanker Serviks yang menargetkan eliminasi kanker pada 2030. Strategi global memuat target 90-70-90, yakni 90% anak perempuan di bawah usia 15 tahun harus menerima vaksinasi HPV untuk mencegah terjadinya infeksi, 70% perempuan berusia 35 tahun dan 45 tahun harus diskriming menggunakan tes performa tinggi, dan 90% perempuan dengan lesi pra-kanker mendapatkan tata laksana sesuai standar.

“Dalam rangka mendukung akselerasi eliminasi kanker leher rahim global, pada tahun 2023 Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) eliminasi kanker leher rahim. Kita membuat rencana aksi nasional untuk eliminasi kanker leher rahim yang lebih advance lagi dari yang WHO minta,” kata dr. Sandra yang disampaikan pada kegiatan temu media melalui Zoom Meeting pada Kamis (22/2/2024).

RAN ini terdiri atas empat pilar. Pilar 1 pemberian layanan bereski kegiatan vaksinasi, skrining dan tata laksana. Pilar 2 edukasi, pelatihan, dan penyuluhan bereski kegiatan penguatan tenaga kesehatan dan kesadaran masyarakat. Pilar 3 pendorong kemajuan bereski kegiatan monitoring, evaluasi, penelitian dan pendukung digital (digital enablers). Pilar 4 pengelolaan dan pengorganisasian bereski kegiatan tata kelola dan kebijakan, pembiayaan untuk eliminasi, kolaborasi dan kemitraan antar-sektor.

Untuk pilar 1, RAN sudah memuat target vaksinasi, skrining, dan tata laksana. Ke-

menkes akan melakukan vaksinasi, skrining, dan tata laksana pada dua fase, yakni fase 1 pada 2023-2027 dan fase 2 pada 2028-2030.

Pada vaksinasi fase 1, Kemenkes menargetkan 90% anak perempuan usia 11 dan 12 tahun kelas 5 dan 6 atau setara, termasuk yang tidak bersekolah, menerima vaksin lengkap. Pada fase ini, Kemenkes juga menargetkan anak perempuan usia 15 tahun yang belum menerima vaksinasi harus menerima vaksinasi lanjutan.

Pada fase 2, 90% anak perempuan dan laki-laki usia 11 dan 12 tahun harus menerima vaksinasi lengkap. Selain itu, Kemenkes juga akan melakukan vaksinasi lanjutan untuk usia 15 tahun dan semua perempuan dewasa yang berusia di atas 21-26 tahun sesuai permintaan dan kebutuhan.

“Untuk usia 21 hingga 26 tahun ini, kami akan minta untuk mandiri, jadi dia tidak masuk pada program nasional tetapi program mandiri. Mereka yang ingin dan membutuhkan akan kita dorong untuk mendapatkan vaksinasi,” ujar dr. Sandra.

Untuk skrining fase pertama, Kemenkes menargetkan 70% perempuan berusia 30 hingga 69 tahun diskriming menggunakan tes DNA HPV. Sedangkan fase kedua, Kemenkes menargetkan 75% perempuan berusia antara 30 hingga 69 tahun melakukan skrining setiap 10 tahun sekali. Metode utama skrining pada dua fase ini akan menggunakan tes DNA HPV.

“Kalau skrining, kami akan skrining seluruhnya (perempuan) usia 30 sampai 69 yang belum diskriming menggunakan tes HPV DNA dan ko-testing dengan IVA. Pemeriksaan HPV itu menggunakan (alat)

Putri Pj Gubernur Raih Summa Cumlaude di UI, Sekda : Menjadi Motivasi Bagi Generasi



Laporan: Mashuri

KENDARI, BP-Meraih predikat Summa Cumlaude pada Universitas Indonesia oleh putri satu-satunya Pj. Gubernur Sultra yang juga Sekjen Kemenkumham RI, Komjen Pol. (P) Dr. (HC) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H, membuat Sekda Sultra, Drs.H Asrun Lio.,M. Hum.,Ph.D mengungkapkan bahwa Nanda Nabila Fahani artinya berhasil lulus dengan predikat sempurna.

Menurut Sekda Sultra, Kamis (22/2/2024) Asrun Lio yang juga berlatar belakang akademisi bahwa untuk meraih predikat Summa Cumlaude, tentu harus ditempuh melalui perjuangan panjang selama menempuh pendidikan, baik itu saat menuju sebuah perguruan tinggi hingga proses kelulusan, apalagi sekelas UI yang merupakan universitas bergengsi serta menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan juga masuk 1000 terbaik di dunia.

“Tidak ada sebuah keberhasilan yang dicapai tanpa adanya proses. Dalam proses inilah, yang tak nampak oleh orang lain, tiba-tiba langsung mendengar kabar keberhasilan-

nya. Demikian halnya dengan Nanda Nabila Fahani, selama menjalani proses pendidikan, baik saat hendak menuju UI hingga berhasil tamat dengan predikat sempurna, tentu banyak cerita suka duka dialami termasuk benturan-benturan yang kemudian kian mengasah tekad untuk meraih yang terbaik,” tutur Sekda Sultra ini.

Sebagai seorang dosen, lanjut Asrun Lio, dirinya banyak memiliki pengalaman terhadap mahasiswanya, dimana antara usaha dan perjuangan selama menempuh pendidikan, tidak akan jauh berbeda dengan apa yang akan dicapai, baik saat penamatan hingga nantinya terjun membaur di masyarakat. Demikian halnya Nanda Nabila Fahani, untuk meraih predikat bergengsi pada perguruan tinggi terbaik di Indonesia, tentu melalui perjuangan nyata, bagaimana konsisten terhadap kedisiplinan diri, fokus, pantang menyerah dan berputus asa, serta selalu berdoa kepada tuhan yang maha esa.

“Selamat kepada Nanda Nabila Fahani, putri dari Bapak Pj Gubernur Sultra yang juga Sekjen Kemenkumham RI, Komjen Pol. (P) Dr.

(HC) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H, atas capaiannya yang lulus di UI dengan menyandang predikat Summa Cumlaude. Artinya, lulus dengan predikat sempurna. Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan terhadap diri sendiri dan keluarga, namun juga mampu memotivasi generasi seusianya. Selamat dan Sukses,” ucap Jenderal ASN Provinsi Sultra ini.

Selain memberikan apresiasi atas prestasi tersebut, Asrun Lio juga mengungkapkan bagaimana penerapan kedisiplinan hingga strategi-strategi dalam menjalankan roda pemerintahan di Bumi Anoa termasuk cara menghadapi dan mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Pj. Gubernur Sultra, sehingga kurang lebih berbagai cara-cara terbaik dari Pj. Gubernur Sultra tersebut, juga menjadi gambaran kecil dalam membentuk Nanda Nabila Fahani kini.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (HC) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H mengungkapkan rasa sukur atas kelulusan sang putri tercinta melalui unggahan histori WhatsApp pribadinya,

Selasa (20/2/2024). Berikut ungkapan rasa sukur, motivasi semangat, dukungan, serta doa dari Pj. Gubernur kepada sang putri tercinta Nabila Farahani.

“Nabila Farahani anandaku terkasih, Bapak sungguh bangga Nak. Pencapaianmu summa cumlaude, sulit untuk Bapak ungkapkan perasaan saat ini. Anak perempuanku satu satunya telah berhasil meraih capaian akademik with highest praise dengan kehormatan tertinggi. Nak, satu tangga kehidupan telah berhasil kamu lewati, bersiaplah dengan melangkah optimis ke tangga kehidupan selanjutnya. Bapak percaya kamu akan dapat mengukir hidupmu di jalan kebaikan. Rayakan dengan gembira dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT. Doa Bapak selalu untukmu, untuk semua cita-citamu, Bapak akan memelukmu dengan segenap doa-doa yang terbaik. Aamiin Ya Rabbal Aalamiinδΰα²δΰα²,” unggah Pj Gubernur, Selasa (20/2/2024).(*)

Harian Pagi
Baubau Post

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky TA
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisna

Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Polisi Akan Panggil Penyelenggara Terkait Dugaan Acara Eks HTI di TMII

Laporan: Hamid

JAKARTA- Polisi bakal memanggil penyelenggara acara bertajuk 'Metamorfoshow : It's Time to be One Ummah' yang diduga digelar oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

"Kemungkinan akan diklarifikasi atau dimintai keterangan," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi, Jumat (23/2).

Menurut Nicolas, klarifikasi ini dilakukan untuk menelusuri kebenaran informasi bahwa acara itu digelar oleh HTI. Sebab pihak penyelenggara mengajukan izin keramaian terkait Perayaan Isra Miraj.

Selain itu, mereka juga tidak mengatasmakan HTI.

"Pasti pihak kepolisian akan menelusurinya (kebenaran isu HTI). Karena TMII meminta izin ke Polsek Cipayung dengan nama kegiatan Perayaan Isra Miraj," ucap dia.

Sebelumnya, HTI diduga menggelar sebuah acara bertajuk 'Metamorfoshow : It's Time to be One Ummah' di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 17 Februari lalu.

Informasi tersebut

ramai beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun media sosial X (dulu Twitter) @chanzyeolk.

"Entah ini sudah yang kesekian kalinya kelompok berbahaya ini HTI lolos dalam menyelenggarakan kegiatan mereka. Berkedok dengan 'Metamorfoshow : It's Time to be One Ummah' 1200 anak muda di cuci otaknya oleh mereka," demikian keterangan dalam unggahan itu.

Dalam akun itu juga disampaikan acara tersebut turut dihadiri Ismail Yusanto selaku eks jubi HTI, Aab El Karami selaku konten kreator HTI, M Ihsan Akbar yang merupakan influencer Gen Z HTI), hingga Akhmad Adiesta yang merupakan narrator, producer dokusinema Sejarah Islam 'Jejak Khilafah di Nusantara'.

Kepala Seksi Humas TMII, Novera Mayang mengaku menerima surat dari panitia acara tersebut pada 7 Februari. Dalam surat itu, disebutkan kegiatan terkait dengan peringatan Isra Miraj.

"TMII menerima surat dari Panitia Metamorpho Show pada tanggal 7 Februari 2024 untuk kegiatan Peringatan Isra Miraj 1445 H yang berlokasi di Gedung Teater Tanah Airku. Surat yang diajukan berupa per-

mohonan free pass dan shuttle kegiatan. Terkait permohonan free pass ini manajemen TMII tidak mengabulkan dan tetap membayar sesuai ketentuan," kata Mayang saat dikonfirmasi, Jumat (23/2).

Mayang menyebut Teater Tanah Airku merupakan aset milik TMII yang dikelola mitra pihak ketiga. Kepolisian juga telah mengeluarkan surat izin keramaian terkait penyelenggaraan acara tersebut.

"Terdapat surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Kapolsek Cipayung pada tanggal 09 Februari 2024, dengan tembusan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur dan Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Timur perihal acara peringatan Isra Miraj 1445 H di Gedung Teater Tanah Airku TMII," ucap dia.

Di sisi lain, mantan juru bicara HTI, Ismail Yusanto enggan berkomentar banyak terkait acara tersebut. Ia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pihak penyelenggara.

"Hubungi panitia saja, carilah itu," kata Ismail.

Kendati demikian, Ismail membenarkan hadir dalam acara yang digelar di Teater Tanah Airku, TMII tersebut.

"Oh iya karena saya diundang kan," ujarnya. (*)

bukti yang disita. Dalam berkas perkara itu, Panji diduga melanggar Pasal 70 jo Pasal 5 UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 KUHP jo. Pasal 64 KUHP.

Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal yakni Penggelapan dan Tindak Pidana Yayasan. Berkas perkara Panji juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Panji disebut menggunakan dana pinjaman atas nama Yayasan Pesantren Indonesia senilai Rp73 miliar untuk keperluan pribadinya. Adapun uang pinjaman tersebut digunakan

Kejagung Tunjuk 15 Jaksa Tangani Perkara Pencucian Uang Panji Gumilang

Pewarta: Alwan

JAKARTA-Kejaksaan Agung RI resmi menerima pelimpahan berkas perkara tahap I terkait kasus dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan berkas perkara itu diterima Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dari Bareskrim Polri pada Rabu (21/2) kemarin.

Usai menerima pelimpahan tersebut, Ketut mengatakan pihaknya telah menunjuk 15 orang jaksa peneliti (jaksa P-16) yang akan memeriksa kelengkapan berkas perkara selama 14 hari ke depan.

"Jaksa Agung Muda

Tim Gegana Polri Terjun ke Lokasi Usai Warga Keracunan Gas PT SMGP



Ratusan warga keracunan gas dari aktivitas uji sumur yang dilakukan PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara

Laporan: Hamid

MEDAN-Polisi melakukan penyelidikan setelah 123 warga keracunan gas dari aktivitas uji sumur yang dilakukan PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut).

"Petugas masih di lapangan melakukan penyelidikan. Dari PT SMGP ada yang dimintai keterangan, tapi baru sebatas kronologis dan teknis pelaksanaan," kata Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/2).

Arie menyebutkan dari pemeriksaan izin pelaksanaan aktivitas PT SMGP memang sudah lengkap. Namun begitu, Tim Gegana Polri dari Polda Sumut telah diturunkan ke lokasi untuk memastikan apakah lokasi sudah steril dan untuk memastikan penyebab dari kejadian itu.

"Kalau izin pelaksanaan sudah pasti dan sudah lengkap. Semua sudah dijalankan. Tinggal untuk memastikan apakah itu betul kebocoran atau tidak, memerlukan tim khusus. Jadi pagi tadi tim bahan beracun dari Gegana Polri Polda Sumut sudah bergeser untuk memastikan apakah sudah steril atau tidak karena menggunakan alat khusus," ujarnya.

Menurutnya saat aktivitas uji sumur dilakukan PT SMGP juga turut disaksikan kepala desa hingga camat. Tak hanya itu mayoritas pekerja di PT SMGP juga merupakan warga sekitar sehingga mereka sudah mengetahui kegiatan aktivitas tersebut. "Tapi dari segi administrasi tidak ada kesalahan. Mulai dari

sosialisasi karena kades camat, juga ikut di lokasi sumur itu. Sebagian pekerja PT SMGP juga warga di sana dipekerjakan mulai dari keamanan desa sampai petugas khusus. Cuma tenaga ahli dari luar. Jadi mereka mengetahui kegiatan itu," pungkasnya.

Arie menambahkan jarak kegiatan aktivitas PT SMGP dengan pemukiman warga hanya berkisar 1 km. Sebelum aktivasi, juga sudah dilakukan sosialisasi kepada warga sekitar.

"Jadi yang terdampak ini warga sekitar yang ada di bawah lokasi PT SMGP. Jadi bukan di lokasi pekerjaan. Sebenarnya sekitar 1 km - 1,5 km jarak proyek dengan pemukiman. Adapun daerah situ terkenal uap panasnya, jadi udaranya tercium bau belerang cukup kuat, tapi belum bisa dipastikan apakah itu kandungannya," ungkapnya.

Saat ini, tambah Arie, kegiatan aktivitas uji sumur telah dihentikan PT SMGP sementara. Selain itu, warga yang terdampak gas beracun sudah dievakuasi ke rumah sakit dan puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan.

"Lokasi aktivasi pembukaan sumur berhenti, sementara ditutup. Fokus utama kami bagaimana masyarakat terdampak kita obati dulu," ujarnya.

Mengenai peristiwa keracunan gas beru-

lang yang dialami warga dari kegiatan PT SMGP, menurut Arie masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Administrasi sudah kita lakukan penyelidikan dan memang izin sesuai. Tinggal lagi bagaimana mitigasi ataupun SOP terkait masyarakat. Karena sampai sekarang di desa itu belum dilengkapi alat pernafasan bantu apabila ada kejadian, kemudian SOP nya bagaimana. Itu yang nanti kita arahkan. Tapi tetap dilakukan penyelidikan untuk memastikan kenapa kejadian ini terjadi berulang," bebarnya.

Terpisah, Koordinator Community Relation PT SMGP Ade Robi Cahyadi mengatakan kegiatan aktivasi segera dihentikan ketika PT SMGP mendengar adanya laporan bau menyengat.

"Kegiatan aktivasi segera dihentikan begitu mendengar adanya laporan bau menyengat dan kepala desa beserta tim CDCR melakukan pemeriksaan di desa dan memberi info indikasi bau sudah tidak ada begitu mereka tiba di desa," urainya.

Ade Robi menegaskan saat ini PT SMGP masih fokus dalam penanganan masyarakat dengan mengerahkan ambulans dan kendaraan untuk menjemput masyarakat yang mengeluhkan kondisi kesehatan-

nya untuk dibawa ke rumah sakit.

"Sementara ini kondisi di desa sudah tertangani dan operasi perusahaan tetap berjalan normal. Aparat keamanan sudah dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban," ungkapnya.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Madina, Muksin Nasution mengatakan sebanyak 123 warga Desa Sibanggor Julu dan Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Merapi mengalami keracunan gas dari kegiatan PT SMGP.

"Kejadiannya pada Kamis 22 Februari 2024 pukul 19.15 WIB. Saat itu PT SMGP melakukan percobaan pembukaan lubang bor yang mengakibatkan warga banyak mengalami mual, muntah, pusing dan pingsan," katanya.

Muksin merinci 123 korban dirawat di rumah sakit dan puskesmas antara lain di RSUD Panyabungan sebanyak 38 orang, 40 orang di RS Permata Madina Panyabungan, 40 orang dirawat di Puskesmas Sibanggor Jae, tiga orang di Puskesmas Kayulaut dan dua orang di Klinik Bidan Irma Desa Huta Tinggi.

"Korban mengalami muntah - muntah, lemas dan pingsan. Korban jiwa tidak ada. Ada sebagian korban yang sudah pulang dan sebagian lainnya masih dirawat. Petugas saat ini masih melakukan pendataan di lokasi," paparnya. (*)

32 Orang ASN Ikuti Tes Makalah dan Wawancara JPT Kota Baubau

Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Setelah mengikuti proses Assessment di Kota Makassar pada 19-20 Februari 2023, sebanyak 32 orang ASN kembali mengikuti Test Penulisan Makalah dan Wawancara pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemerintah Kota Baubau, yang dipusatkan di hotel Galaxy In-Baubau, mulai Sabtu hingga senin (24-26 Februari 2024).

Ke-32 orang ASN ini berseleksi untuk mengikuti 3 jabatan lowong di lingkup Pemerintah Kota Baubau yakni jabatan Inspektur; jabatan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan; dan jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mereka diseleksi dan diawasi langsung pihak Panitia seleksi yang terdiri dari La Ode Aswad S,S.Sos., M.Si (Ketua) dan Plt. Inspektur Bau-

bau); Ir. Wa Ode Suryani Muhibbah, M.Si (Ka. BKPS-DM, anggota); Dr. H. Sudjito, MM (rektor UMM Buton, anggota), Dr. Wa Ode Alzarliani (Rektor UM Buton, Anggota) dan Drs. Gandid Sioni Bungaya (Inspektur Kabupaten Buton, anggota).

Penulisan makalah dan wawancara ini dibuka langsung Pj. Wali Kota Baubau Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M.Si yang dalam arahannya mengemukakan, seleksi terbuka ini adalah untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah, yang diselenggarakan dengan proses yang sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Saudara-saudara ini kegiatan ini adalah proses, siapapun yang terpilih nantinya adalah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, bagi yang belum terpilih tentu potensinya masih bisa dikembangkan atau mungkin lebih cocok di tempat

yang lain, jadi berproses saja," kata Dr. Rasman.

Berkaitan dengan teknis penulisan makalah, ia berharap benar-benar dikerjakan secara baik dengan regulasi yang bersesuaian, bukan mengarang dan data tentu data harus lebih update.

Pada kesempatan ini Dr. Rasman mengatakan dirinya sendiri saat wawancara akan menyiapkan diri dan waktu mengikuti langsung proses wawancara dan memungkin ia sendiri bergabung sebagai bagian dari penilai, sehingga ia meminta semua peserta bersiap-siap.

Sementara itu La Ode Aswad, S.Sos, M.Si selaku ketua Panitia Seleksi menyatakan wawancara akan dilaksanakan selama 3 hari, namun peserta tetap bersiap untuk menyesuaikan keadaan. "Kalau buisa kita padat-belum terpilih tentu bisa jadi 2 hari saja. Intinya semua siap," kata La Ode Aswad. (*)

Disnaker Baubau Open Recruitment Pemagangan Dalam Negeri 2024

Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Baubau tahun 2024 melakukan open recruitment pemagangan dalam negeri tahun 2024. Kegiatan dibuka dari tanggal 20-26 Februari 2024 dan tahap seleksi berkas tanggal 28 Februari 2024.

Hal ini diungkapkan Kadis Nakertrans Kota Baubau Mohamat Abduh, STP, M.Si dalam press releasenya.

Menurut Mohamat Abduh, open rekrutmen pemagangan dalam negeri ini sangat terba-

tas koutanya karena hanya disiapkan 30 orang saja yang dibutuhkan untuk beberapa bidang yakni keperawatan, kebidanan, pramuniaga dan house-keeping. "Nantinya ke-30 orang ini akan ditempatkan di beberapa Perusahaan ternama di Kota Baubau," ujarnya.

Mohamat Abduh berharap, dengan adanya kouta terbatas ini, masyarakat Kota Baubau diharapkan agar segera memanfaatkan momentum dengan membawa berkas di kantor Disnaker Kota Bau-

bau Jalan Jenderal Sudirman No.56 atau ex kantor rumah sakit lama dengan membawa kelengkapan berkas yakni ijazah SD sampai terakhir, pendidikan sarjana dan Transkrip nilai, KTP asli dan foto ukuran 2x3 1 lembar dan ukuran 3x4 2 lembar.

Dikatakan, nantinya peserta yang akan mengikuti program pemagangan dalam negeri ini akan diberikan benefit berupa uang transport dan sertifikat kompetensi. "Buruan segera daftar karena kouta terbatas." katanya. (*)

Memastikan Siswa Siap Ikuti Uji Kompetensi, SMK Negeri 6 Baubau Verifikasi Alat dan Bahan Pada Tiga Jurusan Utama



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Tiga jurusan utama di SMK Negeri 6 Baubau menggelar kegiatan verifikasi alat dan bahan sebagai bagian dari persiapan uji kompetensi kejuruan. Tiga jurusan utama yang dimaksud yaitu jurusan Agribisnis Ternak Unggas, Agribisnis Perairan Air Payau dan Laut, serta Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan yang berlangsung Rabu (21/02/2024).

Kepsek SMK Negeri 6 Baubau Ramsi SPd mengatakan dalam upaya memastikan kesiapan siswa dalam menghadapi uji kompetensi, pihak sekolah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap alat dan bahan yang akan digunakan.

Verifikasi tersebut melibatkan tim ahli dari berbagai bidang terkait diantaranya melibatkan Drs H La Ode Ahmad Ali MSI. Tim verifikasi beker-

ja untuk memastikan bahwa semua peralatan dan bahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ramsi menambahkan bahwa kegiatan verifikasi ini merupakan bagian integral dari persiapan siswa dalam menghadapi uji kompetensi

"Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses kepada

alat dan bahan yang berkualitas untuk mendukung pembelajaran dan pengujian kompetensi mereka," ucap Ramsi dalam rilisnya kepada media ini.

Diharapkan melalui kegiatan verifikasi ini siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja

masa depan.

Untuk diketahui dalam kegiatan verifikasi bertindak sebagai Ketua Panitia Muhammad Hasman, S.Pi.,MP dan tiga kordinator jurusan itu masing-masing I Komang Gunawan SPT merupakan kordinator jurusan Agribisnis Ternak Unggas, Masyitha Zahra Zaidin SPI sebagai kordinator jurusan Perairan Air payau dan Laut, dan Arida SPd merupakan kordinator jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. (*)